

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Interaksi dan interdependensi menjadi konsep yang selalu melekat dalam konteks kesatuan ruang yang saling terintegrasi satu sama lain sebagai bagian dari kehidupan. Kesatuan ruang khususnya pada aspek lingkungan hidup memerlukan keselarasan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang notabene menjadi subjek dan objek utama sasaran pembangunan Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, lingkungan hidup didefinisikan sebagai berikut:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen biotik dan abiotik sebagai unsur utama pembentuk dan pendukung lingkungan hidup dalam tatanan ekosistem memerlukan suatu daya dukung guna berlangsungnya kehidupan yang ideal. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana manusia sebagai variabel pengontrol dapat memperhatikan derajat kemampuan lingkungan guna optimalisasi kebutuhan dasar hidupnya secara bijaksana dan seimbang.

Soemarwoto (2004, hlm. 82), mengemukakan pandangan holistik mengenai pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya menjadi bagian penting kebudayaan manusia yang mengandung nilai-nilai tertentu. Dengan demikian pengelolaan lingkungan merupakan pula bagian kebudayaan manusia....

Dalam pandangan holistik tersebut terkandung sebuah makna bahwa manusia merupakan bagian dari suatu tatanan ekosistem atau dengan kata lain bahwa pandangan hidup yang demikian itu lebih bersifat ekosentris, yaitu manusia diciptakan untuk melindungi alam, bukan sebaliknya.

Pada dasarnya adanya hubungan timbal balik dinamis sirkuler (manusia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan) menyebabkan perubahan tingkah laku manusia sebagai bagian dari adaptasi manusia terhadap kondisi baru lingkungan atau bahkan perubahan lingkungan akibat perubahan tingkah laku manusia itu sendiri. Upaya dalam menjadikan manusia berkebudayaan ramah terhadap lingkungan dan mempunyai komitmen yang tinggi berdampak pada perkembangan kontrol sosial yang kuat atau dengan kata lain bahwa faktor biofisik maupun sosial, ekonomi, dan budaya menjadi sangat penting dan akan berjalan serasi sebagai faktor daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.

Dewasa ini anggapan dasar tersebut memang menjadi kontradiktif jika kita melihat kondisi faktual secara umum. Perkembangan pada aspek fisik dan sosial yang terjadi di daerah perkotaan, khususnya menyangkut pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan ekkses bagi lingkungan akibat sampah yang manusia hasilkan sehingga kualitas aspek fisik dan sosialpun cenderung mengalami regresif. Pada prinsipnya, fenomena tersebut disebabkan pula oleh kebutuhan dasar manusia yang meningkat akibat bertambahnya kegiatan manusia dan pergeseran/reorientasi gaya hidup (*life style*) berupa sifat konsumerisme. Soemarwoto (2004) mengungkapkan bahwa dengan semakin tingginya tingkatan konsumsi manusia, maka semakin banyak pula sumberdaya yang diperlukan untuk menopang pola hidup sehingga ekuivalen dengan banyaknya limbah yang dihasilkan. Fenomena tersebut menjadi sebuah ironi karena daya dukung yang ada tidak diimbangi dengan upaya-upaya pencegahan dan pembatasan terhadap kemungkinan risiko degradasi lingkungan. Ekksesnya yaitu kearifan ekologi yang semakin sulit dijumpai meskipun didukung oleh teknologi pengelolaan lingkungan/persampahan tercanggih sekalipun. Selain itu, pemahaman adanya isu lingkungan masih sebatas gaya hidup dan belum menjadi pola berpikir masyarakat.

Kota Cimahi dengan jumlah penduduk sebesar 529.093 jiwa, laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,21% pada tahun 2013 atau rata-rata sebesar 1.193 jiwa per tahunnya, dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 13.340,7 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, 2014) menyebabkan wilayah Kota Cimahi rentan terhadap berbagai permasalahan yang mencakup aspek sosial,

ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Namun seperti penjelasan sebelumnya, hal yang paling ditekankan adalah pada aspek lingkungan yang semakin rentan mengalami regresif. Apalagi jika dilihat dari rencana Kawasan Cekungan Bandung yang mengkategorikan Kota Cimahi sebagai kawasan permukiman dan industri sehingga menarik para pendatang atau pengembang kawasan, ditambah lagi pergeseran gaya hidup (life style) yang terjadi pada masyarakat modern. Akibatnya, penambahan penduduk dari kalangan urban/pendatang menyebabkan potensi permasalahan lingkungan khususnya sampah menjadi semakin kompleks.

Total proyeksi timbulan sampah berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 1.428 m³/hari dengan perbandingan jumlah penduduk total 530.286 jiwa. Jadi jika diasumsikan laju timbunan sampah perkapitanya mencapai 2,5 liter/orang/hari. Data perhitungan tersebut menjadikan Kota Cimahi menjadi kota dengan kategori sedang dalam hal jumlah timbulan sampah (Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2014).

Tingkat pengelolaan sampah di Kota Cimahi juga masih di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kawasan perkotaan untuk persampahan yang mencapai 70%. Hasil perhitungan mengacu pada data pengolahan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (2014) tentang timbulan sampah domestik di Kota Cimahi seperti tercantum pada tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Timbulan Sampah Kota Cimahi

Uraian	Volume Sampah (m ³ /hari)	Persentase (%)
A. Timbulan Sampah Kota	1.428	100
1. Sampah yang Terkelola	275	19,26
2. Sampah yang Tidak Terkelola	1.153	80,74
B. Sampah yang Terkelola		
1. Sampah yang Terangkut ke TPA	257	18,00
2. Sampah Terolah	18,09	2,27
C. Sampah Organik Terolah	17,75	1,24
Komposter	1,37	0,10
Composting Plan	15,5	1,09
Reaktor Kompos	0,75	0,05
Biogas	0,13	0,01
D. Sampah Anorganik Terolah	0,34	0,02
Bank Sampah	0,34	0,02

Sumber: Dokumentasi DKP Kota Cimahi (2014)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1.1., persentase sampah yang terkelola baru mencapai 19,26% dari standar minimal SPM sebesar 70% atau target *Millenium Development Goals* (MDGs) sektor persampahan menurut Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebesar 75%. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah sebagai penentu kebijakan sekaligus pelaksana serta masyarakat sebagai pemeran vital dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan.

Data pada tabel 1.1. juga dapat mengindikasikan bahwa belum terciptanya sistem pengelolaan sampah secara maksimal berbasis masyarakat yang mungkin disebabkan oleh ketidakpedulian masyarakat untuk mengolah sampah dalam skala kecil/rumah tangga sekalipun. Asumsinya bahwa pengelolaan sampah dianggap belum efektif dan optimal serta partisipasi masyarakat sebagai subjek sasaran program masih rendah. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat jika diasumsikan berdasarkan indikator sampah yang terkelola menjadi sangat vital dan besar pengaruhnya terhadap eksistensi suatu program. Eksistensi dan efektivitas program berkorelasi dengan faktor peran serta masyarakat yang menyebabkan program bisa berkembang atau tidak sesuai dengan tujuan awal penentu kebijakan. Motif dan motivasi setiap anggota masyarakat serta pengaruh beberapa faktor lain yang menyebabkan tingkat partisipasi yang berbeda pula. Namun yang terpenting dalam implementasi dan pengelolaan program adalah adanya upaya sadar dari setiap elemen yang ada pada masyarakat, karena pada hakikatnya lingkungan yang nyaman merupakan suatu kebutuhan.

Dewasa ini pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah yaitu pengelolaan sampah dari sumbernya, karena pada dasarnya pendekatan akhir terkesan hanya “memindahkan masalah ke tempat lain saja dan cenderung menimbulkan efek negatif lain”. Melalui transformasi paradigma pengelolaan/pengolahan sampah tersebut, pemerintah mencoba menetapkan suatu mekanisme mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui UU No. 18 tahun 2008, pasal 20 ayat 1, yaitu pengurangan sampah dengan pembatasan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Manifestasi kebijakan atau aturan mengenai pengelolaan sampah di wilayah Kota Cimahi tercermin dari upaya Pemerintah Kota Cimahi melalui program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan menerapkan program bank sampah sejak tahun 2009. Program rekayasa sosial berbasis masyarakat tersebut juga berpedoman pada asas pengelolaan sampah, yaitu: asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi (UU No. 18 tahun 2008, pasal 3) dan sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah yaitu menjadikan sampah sebagai sumber daya (UU No. 18 tahun 2008, pasal 4) dengan asumsi bahwa sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang berdaya guna.

Strategi yang diterapkan pada program bank sampah lebih mengarah pada konsep 3R (reuse, reduce, recycle) atau dengan pendekatan yang bertumpu pada masyarakat (pemberdayaan). Pola yang diterapkan berupa pola insentif atau dengan kata lain dapat memberikan output nyata bagi masyarakat berupa kesempatan kerja dalam melaksanakan manajemen operasional bank sampah dan investasi dalam bentuk tabungan (Kementrian Lingkungan Hidup, 2011). Program bank sampah merupakan program pengolahan sampah terpadu yang sebenarnya tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus disertai sinergitas antara program dengan masyarakat serta gerakan 3R itu sendiri secara holistik. Karena itu pengelolaan sampah secara terpadu, kompleks, dan berkelanjutan menjadi solusi tepat dalam upaya mewujudkan lingkungan yang ideal.

Perkembangan jumlah bank sampah di wilayah Kota Cimahi cukup pesat dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari awalnya hanya tiga program sebagai *pilot project*, sekarang sudah lebih dari 20 program pada kategori permukiman yang tersebar di tiga kecamatan. Namun sebuah permasalahan muncul disamping kemunculan fenomena bank sampah. Eksistensi dan efektivitas bank sampah selalu mengalami fluktuasi dan cenderung regresif. Keberadaan bank sampah kurang begitu diminati jika dibandingkan dengan cara instan yang bisa dilakukan dan segi ekonomis yang dihasilkan. Banyak bank sampah yang mengalami regresif dari segi jumlah nasabah/partisipan, bahkan sampai mengalami vakum. Namun dari banyaknya program yang vakum tersebut muncullah program bank

sampah baru yang beberapa di antaranya berpotensi mengalami hal yang sama karena indikasi yang terlihat dari aspek manajemen pengelolaan yang kurang baik dan rendahnya peran serta masyarakat. Hal tersebut juga menyebabkan *impact* yang begitu nyata yaitu sangat rendahnya persentase reduksi sampah khususnya sampah anorganik jika dibandingkan sampah yang dihasilkan (lihat tabel 1.1.). Upaya dari pihak Pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang mencoba membuat inovasi berupa pemberian fasilitas dan variasi *reward* dengan tujuan pemberian stimulus agar muncul sebuah inisiasi dalam berpartisipasi seolah-olah tidak berjalan secara optimal. Selain itu ada kecenderungan program bank sampah hanya berkembang pada beberapa wilayah saja akibat distribusi/penyebaran yang tidak merata serta perkembangan program di beberapa wilayah yang cukup lambat. Faktor lainnya yaitu jumlah kepala keluarga (KK) yang terserap menjadi partisipan/nasabah program bank sampah masih minim dan tidak sebanding dengan potensi sampah yang bisa dihasilkan perkepala keluarga. Hal lain yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah penerapan program pembangunan pada masyarakat sebagai sasaran cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Padahal partisipasi masyarakat dalam program pembangunan merupakan aspek yang sangat substansial. Hal inilah yang menimbulkan satu pertanyaan apakah partisipasi disebabkan oleh faktor pengelolaan ataukah faktor lain yang mendasari motif masyarakat dalam berpartisipasi.

Tabel 1.2. Jumlah Partisipan/Nasabah Bank Sampah

Kecamatan	Jumlah Partisipan (Komunal)	Jumlah Partisipan (Individual)	Jumlah Total Partisipan	Jumlah KK	Persentase KK yang Terserap (%)
Cimahi Utara	123	79	202	45.722	0,44
Cimahi Selatan	101	43	144	69.050	0,21
Cimahi Tengah	120	156	276	48.591	0,57
Jumlah Total (Kota Cimahi)	344	278	622	163.363	0,38

Sumber: Hasil Pengolahan dan Dokumentasi DKP, 2015

Fisabil Yusuf P., 2015

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Lokal Melalui Program Bank Sampah Di Kota Cimahi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya serta signifikansi pengaruh faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kajian tersebut coba dituangkan dalam penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Lokal Melalui Program Bank Sampah di Kota Cimahi”.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, dapat diidentifikasi masalah utama adalah sistem reduksi sampah yang hasilnya tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Selain itu faktor partisipasi/peran serta masyarakat dalam penerapan program pengelolaan sampah di Kota Cimahi baik dari lingkup rumah tangga sampai kota masih tergolong rendah.

Dewasa ini banyak program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah yang diterapkan, tetapi banyak pula yang semakin hari semakin tidak berjalan secara semestinya sehingga banyak pula program bank sampah yang selalu berkurang peminatnya. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pengelolaan yang kurang profesional dan implementasi yang kurang efektif karena ada kecenderungan program sebagai teori praktis saja. Beberapa penyebab lainnya yaitu pandangan/persepsi setiap orang yang berbeda-beda serta kesiapan masyarakat yang kurang dalam menanggapi program bank sampah, dan keberadaan masyarakat cenderung diposisikan sebagai objek implementasi program tanpa adanya keterlibatan perencanaan program.

Secara umum masalah penelitian yang menjadi titik fokus rumusan masalah adalah partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah berbasis komunitas lokal melalui program bank sampah di Kota Cimahi. Masalah penelitian tersebut dikhususkan lagi menjadi poin-poin rumusan masalah agar dapat menjadi batasan dalam pemecahan masalah melalui jawaban yang representatif sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan pengelolaan sampah berbasis komunitas lokal melalui program bank sampah di Kota Cimahi?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas lokal melalui program bank sampah di Kota Cimahi?
3. Bagaimana pengaruh kondisi sosial-ekonomi terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas lokal melalui program bank sampah di Kota Cimahi?
4. Bagaimana implementasi kajian pengelolaan sampah melalui program bank sampah terhadap pembelajaran geografi di SMA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas penerapan pengelolaan sampah berbasis komunitas lokal melalui program bank sampah di Kota Cimahi?
2. Mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas lokal melalui program bank sampah di Kota Cimahi.
3. Menghitung seberapa besar pengaruh kondisi sosial-ekonomi terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas lokal melalui program bank sampah di Kota Cimahi.
4. Mendeskripsikan implementasi kajian pengelolaan sampah melalui program bank sampah terhadap pembelajaran geografi di SMA?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Sebagai bahan literatur atau referensi yang relevan bagi penelitian-penelitian selanjutnya agar menjadi acuan untuk pengembangan program yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya

pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan dasar pertimbangan dalam implementasi program bank sampah agar berjalan efektif dan optimal.

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan pengayaan agar wawasan semakin meningkat khususnya tentang pengelolaan sampah dan partisipasi/peran serta masyarakat serta alasan dan kendala yang dihadapi dalam program bank sampah.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah secara bijak dan berkelanjutan serta berdaya guna khususnya dalam program bank sampah karena banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain itu penelitian ini sebagai bahan masukan bagi masyarakat umum untuk dapat menumbuhkembangkan sikap (afektif) dan perilaku (konatif) dalam diri masyarakat itu sendiri terhadap implementasi program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

c. Bagi Pemerintah Daerah Setempat

Sebagai bahan masukan untuk dapat turut serta mengembangkan program bank sampah agar lebih efektif lagi berdasarkan segala kekurangan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi ini berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab I skripsi ini membahas uraian tentang *latar belakang penelitian*, penelitian ini berdasarkan data-data, fakta-fakta sumber referensi dan permasalahan yang terjadi yaitu mengenai rendahnya partisipasi masyarakat dalam program bank sampah. *Identifikasi masalah penelitian*, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sehingga peneliti dapat menentukan batasan masalah dengan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah.

Rumusan masalah, dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah mengenai bagaimana bentuk partisipasi masyarakat, efektivitas penerapan program bank sampah, dan pengaruh kondisi sosial-ekonomi terhadap partisipasi masyarakat. Selain itu bagaimana implementasi kajian penelitian terhadap pembelajaran geografi di SMA.

Tujuan penelitian, menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan poin-poin dalam rumusan masalah.

Manfaat penelitian, dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Struktur organisasi skripsi, berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab.

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab II dalam penelitian ini berisi uraian tentang kajian pustaka mengenai teori-teori yang relevan dan memperkuat penelitian ini.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab III menyajikan mengenai metode penelitian yang menjelaskan lokasi, populasi dan sampel penelitian, metode dan pendekatan penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, tahapan penelitian, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, dan teknik pengolahan serta analisis data.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab IV, disajikan deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengolahan data atau analisis data untuk menghasilkan temuan dari masalah penelitian, jawaban penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, dan pembahasan atau analisis temuan.

5. Bab V Keimpulan dan Rekomendasi

Pada bab V, dijelaskan secara singkat mengenai penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan peneliti, implikasi hasil penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

6. Daftar Pustaka

Berisi mengenai semua sumber tertulis yang relevan dalam penelitian ini, berupa buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain. Dalam penulisan daftar pustaka ini menggunakan sistem penulisan APA (American Psychological Association) berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah UPI tahun 2014/2015.

7. Lampiran-lampiran

Berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian ini. Setiap lampiran diberi nomor urut sesuai dengan urutan penggunaannya dan diberi judul untuk memudahkan pembaca.